

Modul Integritas Bisnis

ELEMEN-ELEMEN PROGRAM ANTIKORUPSI BAGI KORPORASI

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, 2016



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**ELEMEN-ELEMEN
PROGRAM ANTIKORUPSI
BAGI KORPORASI**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN**

JAKARTA, 2016

MODUL INTEGRITAS BISNIS

PENGARAH

**Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Deputi Bidang Pencegahan**

PENANGGUNG JAWAB

**Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Sujanarko**

SUPERVISI

**Pauline Arifin
Roro Wide Sulistyowati**

PENULIS

Nadia Sarah, S.Si, M.Bus (PSM)

PELAKSANA

PT. PPA Consultants

Diterbitkan oleh:

**Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Gedung Dwiwarna KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920**

Cetakan 1: Jakarta, 2016

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta. Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat berperan untuk mendorong: (1) terbangunnya agen perubahan di sektor swasta, (2) terbentuk dan terimplementasinya kebijakan serta regulasi yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta, (3) terwujudnya aksi kolaborasi (*collaborative actions*) pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Dalam mendukung upaya tersebut, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyiapkan modul-modul pembelajaran integritas bisnis (*business integrity*) yang akan diajarkan dan disebarluaskan untuk pihak swasta. Dengan adanya modul ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran pihak swasta terkait dengan korupsi serta gerakan antikorupsi dan membangun bisnis berintegritas bisa berjalan lebih efektif, seiring dengan mendorong penurunan korupsi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Modul **Elemen-elemen Program Antikorupsi bagi Korporasi** ini dibuat dengan tujuan agar peserta mampu memahami dengan baik dan benar dan melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi baik dari sisi internal dan eksternal korporasi maupun aksi kolektif program antikorupsi yang dilakukan bersama-sama oleh korporasi.

Atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyiapkan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembelajaran antikorupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (*business integrity*).

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Sujanarko

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR INFORMASI VISUAL	v
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.....	vi
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DESKRIPSI UMUM	3
C. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	3
D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK.....	4
BAB II ELEMEN PROGRAM ANTIKORUPSI:	
INTERNAL KORPORASI.....	5
A. MEMBANGUN PROGRAM ANTIKORUPSI	
INTERNAL KORPORASI	5
B. CONTOH PELAKSANAAN PROGRAM	
ANTI-KORUPSI INTERNAL KORPORASI.....	10
C. LATIHAN	13
D. RANGKUMAN.....	13
E. EVALUASI MATERI	14
F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT.....	14
BAB III ELEMEN PROGRAM ANTIKORUPSI:	
EKSTERNAL KORPORASI	15
A. MEMBANGUN PROGRAM ANTIKORUPSI	
EKSTERNAL KORPORASI	15
B. CONTOH PELAKSANAAN PROGRAM	
ANTI-KORUPSI EKSTERNAL KORPORASI	17
C. LATIHAN	19
D. RANGKUMAN.....	20
E. EVALUASI MATERI	21
F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT.....	21

BAB IV	AKSI KOLEKTIF PROGRAM ANTIKORUPSI	
	BAGI KORPORASI	23
A.	MODEL DAN CONTOH AKSI KOLEKTIF	
	PROGRAM ANTIKORUPSI BAGI KORPORASI	23
B.	LATIHAN	33
C.	RANGKUMAN	33
D.	EVALUASI MATERI	34
E.	UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	34
BAB V	PENUTUP	35
A.	EVALUASI KEGIATAN BELAJAR	35
B.	UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	39
	DAFTAR PUSTAKA	41
	DAFTAR ISTILAH	43

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Halaman

A. DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pendekatan Program Pencegahan Korupsi di Lingkungan Bisnis	2
Gambar 2.1. Enam Langkah Pembangunan Integritas Bisnis	6
Gambar 2.2. Tahapan <i>Risk Assessment</i> Korupsi	7
Gambar 2.3. Contoh Pelaksanaan <i>Chevron Way</i>	11
Gambar 2.4. Tiga Langkah Antikorupsi di Chevron	11
Gambar 3.1. Program Kepatuhan Siemens dalam Laman <i>Website</i> Perusahaan	19
Gambar 4.1. Tipe Aksi Kolektif	25
Gambar 4.2. Contoh Deklarasi Antikorupsi dalam Kode Praktik Marketing oleh International of Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA)	27
Gambar 4.3. Contoh Sertifikat Koalisi Bisnis	32

B. DAFTAR CONTOH

Contoh 2.1. The Chevron Way	10
Contoh 4.1. The World Economic Forum – Partnership Against Corruption Initiatives (PACI)	30

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gunakan rancang bangun pembelajaran untuk menuntun proses pembelajaran modul ini.
2. Bacalah secara cermat semua materi yang disajikan dalam modul ini dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
3. Dalam secara intensif materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab dengan memperhatikan indikator keberhasilan yang telah dinyatakan di setiap awal bab.
4. Dalam membaca dan mendalami materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab dengan pengajar/fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
5. Cobalah untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada setiap akhir bab dalam modul ini.
6. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi tertentu, bermain *game* atau *role playing*, melakukan simulasi dan/atau studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pengetahuan, pemahaman dan penerapan materi.
7. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini.
8. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN

1.	Nama Diklat	:	Integritas Bisnis (<i>Business Integrity</i>).
2.	Mata Diklat	:	Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi.
3.	Pengajar	:	Pengajar yang mempunyai kualifikasi: a. Berpengalaman dan paham tentang kajian dan permasalahan antikorupsi. b. Pengalaman dalam pengembangan integritas bisnis.
4.	Peserta	:	a. Pelaku bisnis: BUMN dan swasta (5 lima sektor bisnis prioritas, yaitu: kesehatan, infrastruktur, pangan, migas, dan kehutanan). b. Diutamakan di posisi Senior Manajemen atau Auditor Internal atau Komite Etik Perusahaan. c. Total peserta maksimal 20 orang.
5.	Prasyarat	:	Materi dalam Mata Diklat ini disampaikan setelah Peserta mengikuti Mata Diklat: (1) Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis. (2) Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi Kelembagaan. (3) Dampak Sosial Korupsi. (4) Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Strategi Dan Praktik. (5) Insentif Dan Sanksi Pada Korporasi.
6.	Alokasi Waktu	:	4 Jam Pelajaran @45 menit = 180 Menit.
7.	Tempat	:	Ruang kelas ditata dalam bentuk setengah lingkaran.
8.	Deskripsi Umum	:	Mata Diklat ini mencakup: (a) elemen-elemen program antikorupsi internal korporasi, (b) elemen-elemen program antikorupsi eksternal korporasi, dan (c) aksi kolektif dalam membangun program antikorupsi bagi korporasi.
9.	<i>Outcome</i>	:	Terbentuknya korporasi berintegritas (antikorupsi, tidak memberi suap/gratifikasi, transparan, dan akuntabel).
10.	Tujuan Pembelajaran	:	
	a. Kompetensi Dasar	:	Peserta mampu melaksanakan program-program antikorupsi pada perusahaannya baik melalui internal dan eksternal korporasi maupun aksi kolektif secara bersama-sama.
	b. Indikator Keberhasilan	:	1. Mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi internal korporasi, tahapan pembangunan program antikorupsi internal korporasi, dan contoh pelaksanaannya. 2. Mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi eksternal korporasi, cara pembangunan program antikorupsi eksternal korporasi, dan contoh pelaksanaannya. 3. Mampu melaksanakan aksi kolektif, jenis-jenis aksi kolektif dan contoh pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUBMATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ALOKASI WAKTU	KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI (%)	REFERENSI
1.	Mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi internal korporasi, tahapan pembangunan program antikorupsi internal korporasi, dan contoh pelaksanaannya	Elemen Program Antikorupsi : Internal Korporasi	1. Membangun Program Antikorupsi Internal Korporasi 2. Contoh Pelaksanaan Program Antikorupsi Internal Korporasi	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Tanya jawab 4. Simulasi melalui <i>role play</i>	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Aplikasi	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi
2.	Mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi eksternal korporasi, cara pembangunan program antikorupsi eksternal korporasi, dan contoh pelaksanaannya	Elemen Program Antikorupsi : Eksternal Korporasi	1. Membangun Program Antikorupsi Eksternal Korporasi 2. Contoh Pelaksanaan Program Antikorupsi Eksternal Korporasi	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Tanya jawab 4. Simulasi	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Aplikasi	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi
3.	Mampu melaksanakan aksi kolektif, jenis-jenis aksi kolektif dan contoh pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi	Aksi Kolektif Program Antikorupsi bagi Korporasi	1. Model dan Contoh Aksi Kolektif Program Antikorupsi bagi Korporasi	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Tanya jawab 4. Simulasi	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	2 Jam Pelajaran (90 menit)	Kemampuan Aplikasi	40	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi di sektor swasta akan berdampak buruk bagi persaingan bisnis, stabilitas ekonomi, perdagangan dan investasi. Dengan terkuaknya beberapa skandal korupsi global dunia membangun kesadaran bahwa upaya-upaya pencegahan korupsi di sektor swasta perlu terus ditingkatkan.

Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) ke dalam UU No. 7 Tahun 2006, termasuk didalamnya mengatur mengenai pencegahan korupsi di sektor swasta, larangan penyuapan kepada Pejabat publik (termasuk Pejabat publik Asing dan Pejabat dari Organisasi Internasional) dan larangan penyuapan di lingkungan swasta¹. Pelaksanaan US *Foreign Corruption Practice Act* (FCPA) dan UK *Bribery Act* (UKBA) 2010 yang melekat pada *Multi National Companies* (MNCs) semakin ketat. Beberapa organisasi dunia juga terus menggaungkan upaya-upaya mengurangi resiko terjadinya korupsi dengan mempromosikan transparansi, penguatan integritas dan mendorong kolaborasi pada sektor swasta termasuk usaha kecil dan menengah.

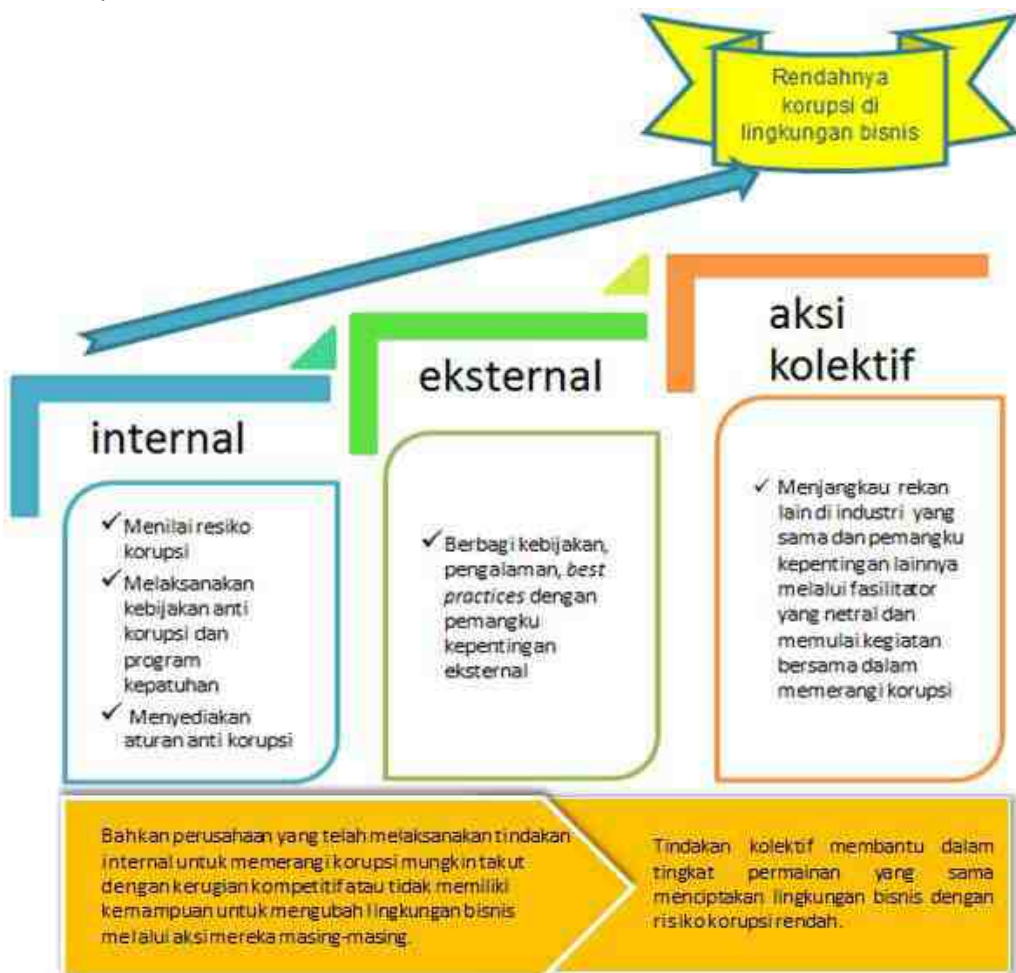
Perilaku koruptif harus dihindari bagi pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini merupakan tanggungjawab semua pihak. Selain upaya yang dilakukan pemerintah melalui penguatan regulasi, pihak swasta harus mampu membentengi dirinya dari tindakan-tindakan koruptif. Hal ini berlaku umum, tidak hanya perusahaan global asing tetapi juga perusahaan nasional, termasuk usaha kecil dan menengah yang beroperasi di Indonesia.

Hasil survey awal KPK terhadap sektor swasta yang dilakukan melalui beberapa asosiasi bisnis di awal tahun menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan, khususnya perusahaan nasional yang belum memiliki program pencegahan korupsi. Sementara, beberapa perusahaan yang telah memiliki program

¹ Lihat Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 21 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003, dalam: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.

pencegahan, belum dapat melaksanakan program tersebut secara optimal dan efektif.

Program anti korupsi menjadi kebutuhan bagi korporasi untuk melindungi bisnis dari dampak dan resiko korupsi. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan dalam membangun program anti korupsi sehingga terwujud lingkungan bisnis dengan tingkat resiko yang lebih rendah². Pendekatan elemen program antikorupsi terbagi menjadi tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam korporasi (lihat **Gambar 1.1**).



Sumber: World Bank, 2008

Gambar 1.1. Pendekatan Program Pencegahan Korupsi di Lingkungan Bisnis

² World Bank, 2008, *Fighting Corruption Through Collective Action: A Guide for Business*, Version 1.0, The World Bank, halm. 14.

Melalui modul ini, KPK berupaya memberikan pemahaman dan berbagi pengetahuan kepada pihak swasta, khususnya terkait elemen-elemen program antikorupsi yang dapat diimplementasikan oleh pihak swasta. Elemen ini mencakup program antikorupsi yang dilakukan secara internal, eksternal maupun bersama-sama melalui kegiatan kolaboratif dengan berbagai pihak serta menggunakan *best-practices*, *guidelines* dari berbagai organisasi dunia dan contoh-contoh dari berbagai negara.

Modul ini dapat digunakan sebagai *guidelines* dalam penyusunan program anti korupsi di lingkungan korporasi/perusahaan, maupun upaya peningkatan program anti korupsi yang sudah ada namun belum efekti terlaksana. Selain itu, modul ini juga dapat digunakan oleh praktisi dan peneliti antikorupsi yang ingin mengetahui dan mengembangkan program anti korupsi di sektor swasta.

Elemen program anti korupsi yang ada pada modul ini dapat diselaraskan dengan modul lain yang berkaitan dengan strategi pencegahan yang dapat diselaraskan dan disusun oleh perusahaan. Dengan adanya modul ini, diharapkan pihak swasta lebih berkomitmen, memahami lebih dalam mengenai program anti korupsi dan mampu membangun bisnis yang berintegritas secara lebih efektif. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan praktik-praktik korupsi di lingkungan swasta dapat berkurang demi terciptanya lingkungan bisnis dan perekonomian yang lebih baik.

B. DESKRIPSI UMUM

Modul **Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi** membekali peserta tentang (a) elemen-elemen program antikorupsi dari sisi internal korporasi berikut contoh pelaksanaannya, (b) elemen-elemen program antikorupsi dari sisi eksternal korporasi berikut studi kasus dan *best-practices*, serta (c) aksi kolektif program antikorupsi yang dilakukan bersama-sama oleh korporasi dan contoh pelaksanaannya.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melaksanakan program-program antikorupsi pada perusahaannya baik melalui internal dan eksternal korporasi maupun aksi kolektif secara bersama-sama.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta:

- a) Mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi internal korporasi, tahapan pembangunan program antikorupsi internal korporasi, dan contoh pelaksanaannya.
- b) Mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi eksternal korporasi, cara pembangunan program antikorupsi eksternal korporasi, dan contoh pelaksanaannya.
- c) Mampu melaksanakan aksi kolektif, jenis-jenis aksi kolektif dan contoh pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi.

D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK

Dengan mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok dan submateri pokok dalam Modul **Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi** ini adalah:

1.	Elemen Program Antikorupsi: Internal Korporasi: a) Membangun Program Antikorupsi Internal Korporasi. b) Contoh Pelaksanaan Program Antikorupsi Internal Korporasi.
2.	Elemen Program Antikorupsi: Eksternal Korporasi: a) Membangun Program Antikorupsi Eksternal Korporasi. b) Contoh Pelaksanaan Program Antikorupsi Eksternal Korporasi.
3.	Aksi Kolektif Program Antikorupsi bagi Korporasi: a) Model dan Contoh Aksi Kolektif Program Antikorupsi bagi Korporasi: 1) Deklarasi Antikorupsi. 2) Pakta Integritas. 3) Prakarsa Prinsip. 4) Sertifikasi Koalisi Bisnis.

Dalam mempelajari materi pokok dan submateri pokok tersebut dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci (*key questions*) sebagai berikut:

- ✧ Apa saja program antikorupsi?
- ✧ Bagaimana membangunnya?
- ✧ Apa sesungguhnya yang dinamakan aksi kolektif dalam program pencegahan korupsi pada sektor bisnis?
- ✧ Apa saja yang sudah Anda dan korporasi lakukan?

BAB II

ELEMEN PROGRAM ANTIKORUPSI: INTERNAL KORPORASI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi internal korporasi, tahapan pembangunan program antikorupsi internal korporasi, dan contoh pelaksanaannya.

A. MEMBANGUN PROGRAM ANTIKORUPSI INTERNAL KORPORASI

Pendekatan pertama pembangunan program antikorupsi dilakukan dari sisi internal korporasi. Melalui pendekatan internal, korporasi dapat mampu melakukan penilaian resiko korupsi di masing-masing korporasi, dapat melaksanakan kebijakan antikorupsi dan program kepatuhan dan tersedia aturan antikorupsi di internal korporasi.

Elemen program antikorupsi merupakan sebuah **siklus yang berkelanjutan** dari sebuah komitmen menjadi sebuah aksi yang terus diperbaiki untuk memperkuat program antikorupsi. Langkah membangun program antikorupsi internal terdiri dari berbagai tahapan. Dalam modul ini, tahapan pembangunan program antikorupsi dilakukan dengan menggunakan pendekatan 6 (enam) langkah Integritas Bisnis yang dikembangkan oleh Transparency International³ serta mengadopsi beberapa pendekatan yang telah disusun oleh UNODC⁴ (lihat **Gambar 2.1**).

³ Lihat lebih lanjut pada Transparency International Website
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_integrity_toolkit.

⁴ UNODC *An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide*, 2013.



**Gambar 2.1. Enam Langkah Pembangunan Integritas Bisnis
(menurut Transparency International)**

Keenam langkah mudah dalam membangun program antikorupsi adalah sebagai berikut:

1. Berkomitmen antikorupsi.
2. Menilai kondisi dan lingkungan resiko (*risk assessment*) saat ini.
3. Merencanakan program-program antikorupsi.
4. Melaksanakan rencana yang telah disusun.
5. Monitor kemajuan pelaksanaan program.
6. Melaporkan pelaksanaan program.

Adapun penjelasan dari setiap langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkomitmen Antikorupsi

- ✓ Kebijakan antikorupsi merupakan prasyarat yang harus dimiliki korporasi dalam mencegah korupsi terjadi.
- ✓ Budaya integritas dan komitmen program antikorupsi harus dibangun dan diawali dari puncak korporasi. Tunjukkan rasa kepemilikan program antikorupsi dan tanggungjawab pimpinan.
- ✓ Komitmen antikorupsi harus jelas menyuarakan tidak ada toleransi bagi

korupsi.

- ✓ Dikomunikasikan secara tertulis ke dalam bentuk formal yang kemudian diedarkan ke seluruh lapisan perusahaan.
- ✓ Komitmen ini perlu didukung peraturan dan kebijakan yang mendukung terlaksananya program yang mendorong nilai-nilai dasar seperti integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- ✓ Juga termasuk komitmen untuk menjamin program ini dapat berjalan dengan baik dengan menyediakan sumber daya yang cukup.
- ✓ Hindari standar ganda dalam memandang perilaku koruptif maupun pelaksanaan komitmen.
- ✓ Perbarui komitmen dalam upaya peningkatan komitmen antikorupsi yang lebih kuat secara periodik.

2. Menilai Kondisi dan Lingkungan Resiko (*Risk Assessment*) Saat Ini

- ✓ Tidak ada korporasi yang kebal dari resiko korupsi, dan resiko tersebut tetap akan menjadi negatif jika terus diabaikan dan menyebabkan dampak yang tidak diharapkan (UNODC, 2013).
- ✓ Tidak ada program antikorupsi yang *one-size-fits-all*, sesuai dengan segala kondisi korporasi, karena masing masing korporasi mempunyai karakteristik (skala, jenis, bidang usaha, lokasi, dan lain-lain) yang berbeda satu sama lain.
- ✓ Tahapan yang dilakukan dapat digambarkan pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2. Tahapan *Risk Assessment* Korupsi⁵

- ✓ Identifikasi resiko inheren korupsi dari sisi industri, negara/ lokasi operasional bisnis, resiko-resiko korupsi yang spesifik, misalnya proses pengadaan,

⁵ Disarikan dari: *An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide* (UNODC, 2013) dan *Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business* (OECD – UNODC – World Bank, 2013).

- interaksi dengan pemerintah, penggunaan perantara (*intermediaries*), pembayaran fasilitas, kontribusi politik, dan lain sebagainya.
- ✓ Dokumentasikan ke dalam *risk register* untuk dilakukan analisis lebih lanjut dan acuan untuk penilaian resiko di periode berikutnya.
 - ✓ Gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana program korupsi yang dilakukan berdasarkan prioritas dari tingkat penilaian resiko korupsi.

3. Merencanakan Program Antikorupsi

- ✓ Hasil penilaian resiko menjadi dasar penyusunan rencana program antikorupsi.
- ✓ Susun langkah prioritas dan alokasi sumber daya pada resiko-resiko yang tinggi.
- ✓ Mulai dari menyusun kebijakan dan menentukan ruang lingkup dan aktivitas program antikorupsi yang akan dibangun.
- ✓ Program yang disusun harus sesuai dengan bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan di lingkungan bisnis.
- ✓ Pertimbangan berdasarkan hasil penilaian resiko, apakah program tersebut:
 - merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi resiko?
 - memerlukan perubahan regulasi?
 - memerlukan teknologi baru/sistem prosedur baru?
 - memerlukan pengawasan dan kontrol yang tepat?
 - memerlukan penanggungjawab khusus?
 - dapat terakomodir saran, keluhan dan pengaduan?
 - dapat terkomunikasikan kepada internal dan eksternal?
- ✓ Diskusikan dan reviu rencana program dengan berbagai pihak dari pihak manajemen, perwakilan pegawai dan jika memungkinkan kepada pihak eksternal.

4. Melaksanakan Rencana

- ✓ Seluruh rencana program antikorupsi yang telah ditetapkan diwujudkan dalam berbagai langkah nyata.
- ✓ Program antikorupsi perlu diintegrasikan dengan kebijakan dan prosedur termasuk struktur organisasi dan bisnis yang berjalan, melalui berbagai cara antara lain:
 - pembangunan sistem pendukung (misal IT).
 - komunikasi program (misal melalui *newsletter*, majalah internal perusahaan, *workshop/seminar*, pelatihan).

- pemilihan beberapa *champion* di daerah untuk mendukung implementasi.
 - pelatihan kepada pegawai khusus yang berhubungan langsung dengan resiko korupsi.
 - penyusunan perangkat dan petunjuk pendukung (misalnya *self assessment survey*).
 - mengalokasikan jalur penyampaian pemikiran dan pendapat (*hotline* khusus, FAQ, dan lain-lain).
 - pembangunan layanan *hotline* ataupun sistem pengaduan (*whistle blowing system*).
- ✓ Kontrol dan peran senior manajer pada pelaksanaan program tersebut sangat penting.
 - ✓ Agar menjadi lebih efektif, dalam pelaksanaan program ini perlu ditentukan juga *system reward and punishment*. Sanksi yang jelas dan tegas, maupun insentif yang mendorong pelaksanaan program. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan nilai dan program antikorupsi juga perlu dilakukan dapat memberikan motivasi dan kebanggaan kepada para pelaksana program lainnya.

5. Monitor Kemajuan Pelaksanaan Program

- ✓ Tindaklanjuti dengan monitor dan evaluasi yang rutin dan periodik untuk memastikan keefektifan program dan perbaikan yang diperlukan.
- ✓ Program antikorupsi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan terlaksana secara berkelanjutan.
- ✓ Monitoring pelaksanaan program dapat dilakukan secara internal (pengawasan internal) ataupun monitoring eksternal yang dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk misalnya (pengawas eksternal).
- ✓ Pelaksanaan monitoring dapat melihat apakah kebijakan dan program antikorupsi telah diterapkan pada kegiatan bisnis sehari-hari dan apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya.
- ✓ Hasil monitoring kemudian disampaikan kepada pihak manajemen (dalam hal ini bisa BoD ataupun Komite Audit) untuk direviu dalam memastikan pelaksanaan program ini telah sesuai dengan harapan.
- ✓ Jadikan hasil monitoring sebagai bahan perbaikan ke depan dan juga sebagai bahan pelaporan baik kepada pihak internal maupun eksternal.

6. Melaporkan Pelaksanaan Program secara Internal dan Eksternal

- ✓ Laporan dapat menunjukkan komitmen perusahaan dan bagaimana nilai-nilai

dan kebijakan diterjemahkan dari sebuah komitmen menjadi aksi.

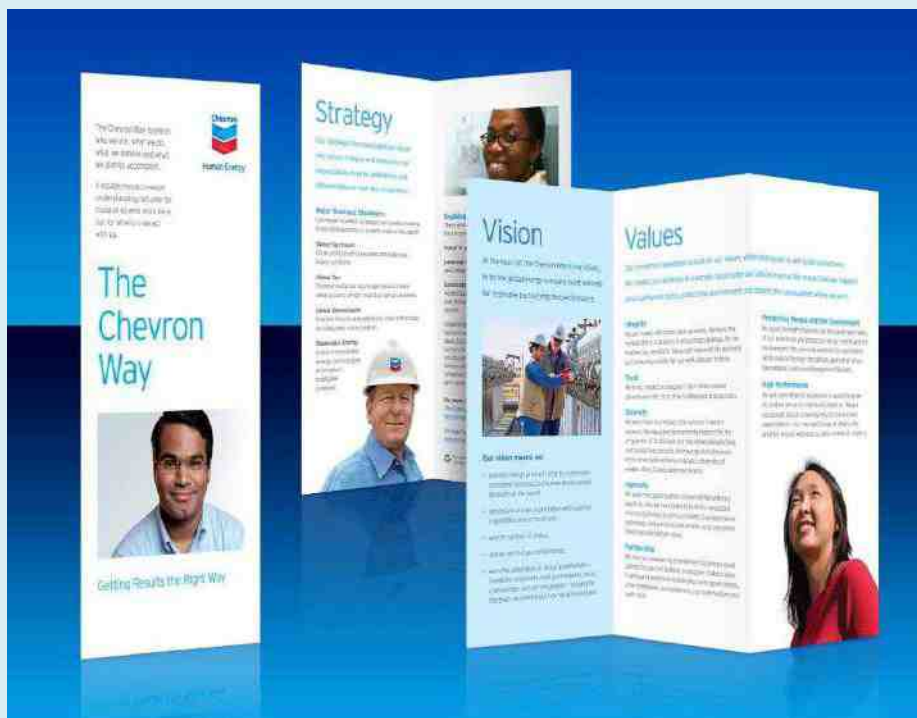
- ✓ Dari sisi internal, laporan akan meningkatkan kesadaran di antara para pegawai dan tersedianya kontrol dan disiplin dari sisi manajemen.
- ✓ Dari sisi eksternal, laporan juga dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dan di lingkungan pasar bisnis. Laporan ini akan juga berguna sebagai bahan untuk mengukur, membandingkan, mendiskusikan dan meningkatkan aktivitas dan praktek antikorupsi.
- ✓ Laporkan informasi baik dalam yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif terkait praktik antikorupsi yang mendapat perhatian dan *outcome* yang dihasilkan, misalnya:
 - bagaimana program antikorupsi dijalankan di perusahaan.
 - bagaimana persepsi pegawai dan respon pegawai terhadap kebijakan antikorupsi perusahaan.
 - jumlah akses maupun pelaporan yang diterima *hotline* ataupun *whistleblower system*.
 - jumlah pelanggaran yang terjadi dan tindakan korektif yang dilakukan atas pelanggaran tersebut.
 - penerapan sanksi dan transaksi yang gagal karena resiko korupsi.
- ✓ Diskusikan laporan tersebut kepada pihak eksternal, para pemangku kepentingan, forum, kelompok kerja, asosiasi untuk berbagi praktik yang baik maupun yang buruk untuk menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan lain dan mendapatkan masukan (lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada bab berikutnya mengenai elemen program antikorupsi eksternal).

B. CONTOH PELAKSANAAN PROGRAM ANTIKORUPSI INTERNAL KORPORASI

Tahapan pembangunan program antikorupsi di perusahaan energi Chevron melalui program yang dikenal dengan *The Chevron Way*.

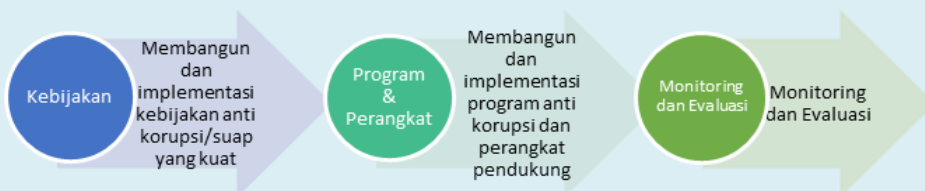
Contoh 2.1. *The Chevron Way*

Chevron memiliki misi untuk menjadi perusahaan energi dunia yang dibanggakan karena sumberdaya manusia, hubungan kerjasama dan kinerjanya. Untuk mencapai visi tersebut Chevron menerapkan *The Chevron Way*. Nilai-nilai yang menjadi dasar di perusahaan ini adalah *integrity, trust, diversity, ingenuity, partnership, protecting people and the environment* serta *high performance* (lihat **Gambar 2.3**).



Gambar 2.3. Contoh Pelaksanaan *The Chevron Way*

Dalam menjalankan nilai *integrity*, Chevron melakukan 3 langkah dalam melakukan langkah-langkah antikorupsi dan antisuap (lihat **Gambar 2.4**).



Gambar 2.4. Tiga Langkah Antikorupsi di Chevron

Pada tahap 1 terkait kebijakan, Chevron melakukan penerapan beberapa hal sebagai berikut:

1. ***Business Conduct & Ethic Codes***: memberikan petunjuk untuk sepenuhnya patuh dengan hukum dan menjadikan bisnis dengan standar tertinggi dari kejujuran dan integritas.
2. ***Conflict of Interest***: melarang para pegawai untuk terlibat dalam aktifitas yang berbenturan dengan bisnis Chevron, mempengaruhi reputasi Chevron

ataupun hubungan dengan pihak lainnya, dan mengintervensi tanggungjawab pegawai.

3. ***Foreign Corruption Practice Act (FCPA)***: kebijakan pemerintah Amerika yang melarang tawaran atau pembayaran “segala sesuatu yang bernilai” kepada petugas, partai politik, jajaran partai politik, dan kandidat dari kantor pemerintah di luar Amerika dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau memperoleh keuntungan yang tidak wajar untuk tujuan memperoleh ataupun mempertahankan bisnis.

Pada tahap 2, Chevron membangun dan melaksanakan program antikorupsi dan antisuap antara lain sebagai berikut:

1. Mengatur kontrol internal dan kepatuhan organisasi di dalam keuangan untuk memastikan kebijakan perusahaan dipahami dan dijalankan oleh seluruh pihak.
2. Membangun perangkat pendukung untuk mengimple-mentasikan program kepatuhan:
 - Memasukkan kepatuhan ke dalam perjanjian kinerja tahunan pegawai.
 - Melakukan pelatihan berbasis komputer yang wajib diikuti oleh pegawai dan kontraktor, contohnya *Business Conduct & Ethic Codes*, *Conflict of Interest Survey*, *FCPA*, Memimpin dengan Integritas.
3. Membuat dan mengelola *Hotline* Kepatuhan.
4. Melaksanakan workshop tatap muka terkait *FCPA/Conflict of Interest/* Kepatuhan dengan tim Chevron, *vendors*, dan rekan bisnis lainnya.
5. Melakukan tahapan *pre-approval/clearance* untuk aktivitas yang berkaitan dengan aparat pemerintah sebelum menjalankan program ataupun aktivitas.
6. Menetapkan *Investigation Governance Board (IGB)* untuk menindaklanjuti laporan pengaduan (*whistle-blower*) dan memberikan sanksi kepada pegawai atau vendor.
7. Melakukan *Independent Contractor Audits*.

Pada tahap terakhir, Chevron melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang telah disusun, dari berbagai sisi antara lain kontrak kinerja pegawai, pelatihan kepatuhan, Rapat Komite Kepatuhan, audit internal, pelaporan perusahaan, dan *database* aksi kepatuhan.

Sumber: IIBIC, 2016⁶

⁶ Dipresentasikan oleh Wayne P. Borduin, Vice President Finance Chevron, dalam sesi Government-Private Partnership Anti-corruption & Anti-bribery Practice, International Business Integrity Conference (IBIC) 2016, 16 November 2016.

C. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal-soal latihan berikut:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Program antikorupsi dapat dilakukan tanpa komitmen dari pimpinan puncak perusahaan.		
2	Program antikorupsi di satu perusahaan dapat di-copy dari korporasi satu ke korporasi lainnya.		
3	Penyusunan penilaian resiko cukup dilakukan oleh bagian pengendali internal.		
4	Langkah prioritas program antikorupsi disusun berdasarkan resiko yang rendah.		
5	Pelaksanaan program antikorupsi tidak membutuhkan penyesuaian kepada proses bisnis dan regulasi.		
SCORE (?)			

D. RANGKUMAN

- Langkah awal menciptakan lingkungan bisnis dengan resiko korupsi minimal adalah membangun program antikorupsi di internal perusahaan.
- Elemen antikorupsi internal merupakan sebuah siklus tahapan dari sebuah komitmen menjadi langkah-langkah nyata upaya antikorupsi.
- Pembangunan program antikorupsi internal melalui pendekatan 6 (enam) langkah: (a) Komit, (b) Nilai, (c) Rencana, (d) Aksi, (e) Monitor, dan (f) Laporan.
- Komitmen perusahaan merupakan modal pembangunan program antikorupsi internal dan harus dibangun dari jajaran puncak perusahaan.
- Penilaian resiko merupakan dasar penyusunan program pencegahan korupsi yang tepat bagi perusahaan, lakukan proses persiapan, identifikasi, penilaian dan mitigasi terhadap resiko korupsi.
- Berdasarkan hasil penilaian resiko, rencanakan program berdasarkan prioritas dan libatkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal sebelum ditetapkan.
- Laksanakan rencana dengan mengintegrasikan dengan proses bisnis yang berjalan dan memerlukan kontrol dan peran senior manajer. Sistem *reward and punishment* dapat membantu program antikorupsi internal perusahaan menjadi lebih efektif.

8. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara reguler untuk melihat sejauhmana program ini terlaksana menjadi bahan perbaikan ke depan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal perusahaan.
9. Laporkan bagaimana program ini dilaksanakan kepada pihak internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kesadaran di pihak internal dan menunjukkan komitmen perusahaan kepada pihak eksternal.

E. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, lakukanlah simulasi melalui *role play*.

Saat ini Anda sedang melaksanakan *Board Meeting* untuk memutuskan bagaimana menunjukkan komitmen perusahaan yang kuat terhadap antikorupsi dengan tidak mengurangi semangat para pegawai untuk bekerja. Direktur Utama menunjuk Anda untuk berkreasi menunjukkan komitmen melalui slogan atau *tagline* yang akan menjadi motto perusahaan.

Diskusikan dengan Tim Anda tentang bagaimana hal ini akan dilakukan! (Diskusi Kelompok – 5 Menit).

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB III

ELEMEN PROGRAM ANTIKORUPSI: EKSTERNAL KORPORASI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu melaksanakan elemen-elemen program antikorupsi eksternal korporasi, cara pembangunan program antikorupsi eksternal korporasi, dan contoh pelaksanaannya.

A. MEMBANGUN PROGRAM ANTIKORUPSI EKSTERNAL KORPORASI

Upaya pencegahan korupsi jangan berhenti sampai di internal korporasi. Mengingat besarnya dampak korupsi, program pencegahan korupsi perlu diperkuat ke eksternal korporasi. Dalam hal ini, korporasi didorong untuk lebih mengekspresikan secara aktif komitmennya untuk melawan korupsi.

Program pencegahan korupsi dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan memberikan keunggulan dari korporasi lainnya. Bagi investor, mengetahui program pencegahan korupsi yang dijalani perusahaan dapat memberikan ketenangan bahwa resiko kerugian investasi akibat praktik korupsi menjadi lebih rendah, karena korporasi telah berupaya melakukan upaya pencegahan. Namun upaya ini perlu diketahui pihak eksternal. Tanpa upaya dari perspektif eksternal, program pencegahan korupsi menjadi tidak efektif.

Beberapa cara yang dapat dilakukan korporasi dari perspektif eksternal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi publik.

Mengkomunikasikan program antikorupsi internal kepada pihak eksternal penting dilakukan oleh korporasi. Laporan kepada publik adalah memformalkan transparansi dan merupakan penghubung yang penting pada rantai akuntabilitas. Melalui laporan publik, sebuah perusahaan dapat

menyampaikan informasi dengan cara terstruktur hal-hal yang penting bagi pemangku kepentingan dan dapat membangun kepercayaan publik⁷.

Lebih lanjut, menurut World Bank (2008)⁸ mengkomunikasikan standar dan kebijakan perusahaan akan membantu pegawai dan *partner* bisnis untuk menolak suap dan mendorong pelaporan kejadian penyuapan. Komunikasi kepada pihak eksternal dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

- ✓ membuat pernyataan prinsip dan kebijakan yang jelas dan tidak ambigu.
- ✓ menyatakan harapan bahwa *partner* bisnis, pihak-pihak di rantai distribusi dan pemasok akan melakukan penyesuaian dengan kebijakan perusahaan.
- ✓ melaporkan kepada pemangku kepentingan aktivitas-aktivitas internal untuk melawan korupsi.
- ✓ berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik.

Hal ini dapat dilakukan melalui laporan tahunan, laporan CSR (*Corporate Social Responsibility*), studi kasus, *website* perusahaan, presentasi di konferensi antikorupsi dan bisnis, siaran pers ataupun diskusi dengan wartawan. Langkah-langkah ini akan bermanfaat untuk memicu interaksi dengan organisasi lain yang dapat memberikan umpan balik, menyarankan perubahan dan membagikan contoh praktik yang terbaik. Hal ini juga akan berkontribusi untuk mengurangi resiko korupsi dan akan membantu pegawai untuk menolak permintaan suap dan memberikan kepercayaan diri untuk melaporkannya. Di satu sisi, hal ini juga bermanfaat untuk membangun reputasi menjadi sebuah perusahaan yang beretika.

Berbagi praktik terbaik maupun kegagalan program antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai pihak eksternal, sebagai contoh melalui forum diskusi, kelompok kerja, ataupun asosiasi untuk menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan lain dan mendapatkan masukan. Hal ini dapat pula memperkaya internal perusahaan dengan mendapatkan pengetahuan baru dari perusahaan lain.

2. Menyebarluaskan kebijakan dan program antikorupsi kepada mitra bisnis lainnya.

Dalam menjalankan program antikorupsi, perusahaan tidak akan terlepas dari interaksi dengan mitra kerja, pemasok, agen, anak perusahaan, distributor,

⁷ Huguette Labelle, 2009 dalam Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption, Global Impact dan Transparency International, 2009.

⁸ World Bank, op.cit, halm. 22.

perantara maupun kontraktor. Untuk itu, perusahaan perlu menginformasikan bagaimana prinsip-prinsip perusahaan dan program antikorupsi dijalankan.

Komunikasikan dengan jelas kepada pihak-pihak tersebut bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya melalui internalisasi program antikorupsi yang telah dibuat. Hal ini akan mencegah para pihak tersebut untuk melakukan hal yang bertentangan yang telah ditetapkan perusahaan sehingga resiko yang berdampak pada perusahaan dapat diminimalisir. Tegaskan dengan jelas, sejauh mana hal ini akan berdampak pada mitra kerja dan aturan main yang perlu diikuti oleh pihak-pihak terkait.

Berikan pelatihan kepada para kontraktor, agen, distributor sehingga mereka dapat juga memahami dan menjalankan prinsip tersebut. Minta komitmen mereka untuk dapat mengikuti kebijakan tersebut dan berikan sanksi jika mereka tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan. Hal penting lainnya adalah melakukan *due-dilligent* proses sebelum membuat kerjasama dengan pihak yang terkait dengan perusahaan.

B. CONTOH PELAKSANAAN PROGRAM ANTIKORUPSI EKSTERNAL KORPORASI

Contoh pelaksanaan program antikorupsi eksternal diambil dari **Program Antikorupsi Eksternal SIEMENS⁹**.

SIEMENS secara lengkap menjelaskan bagaimana komitmen, kebijakan dan pelaksanaan program kepatuhan diterapkan secara lengkap melalui berbagai cara secara komunikasi publik dan menyebarkan program antikorupsi tersebut kepada pihak lain termasuk mitra bisnis dan masyarakat global. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

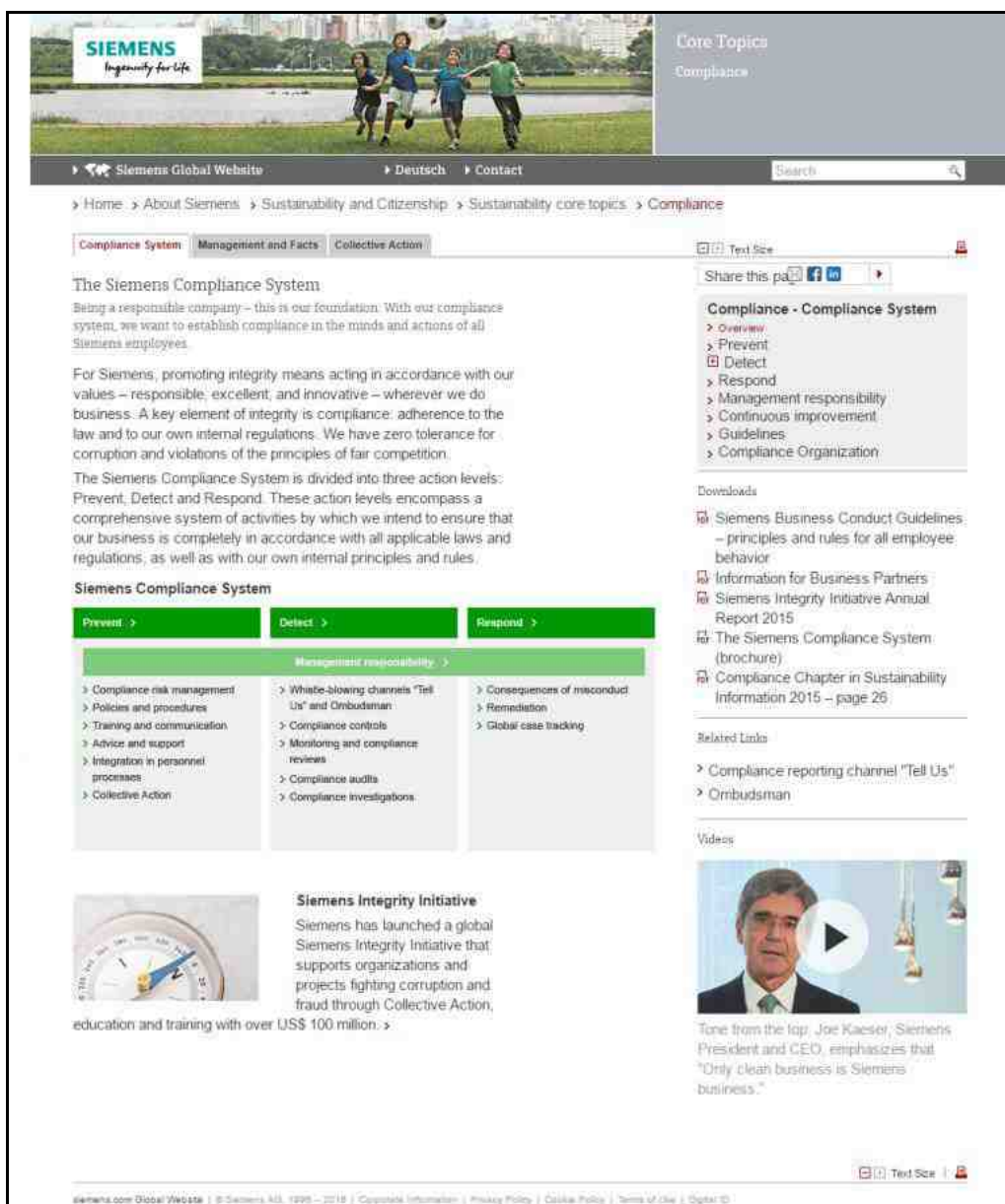
1. **Melalui laman khusus pada *website* perusahaan.** Hal ini memberikan kesempatan kepada perusahaan lain untuk mempelajari dan membandingkan dengan apa yang dilakukan SIEMENS dalam meningkatkan program kepatuhan.
2. **Konferensi.** Setiap tahunnya SIEMENS menyelenggarakan konferensi terkait kepatuhan organisasi untuk mempromosikan kolaborasi dan memberikan

⁹ Siemens, 2016, *The Siemens Compliance System*,
<<http://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability/compliance.html>>, diakses 30 November 2016.

kesempatan kepada seluruh peserta untuk berbagi dan berdiskusi terkait isu-isu terkini dan tantangannya.

3. **“Tell Us” and Siemens Ombudsman.** Merupakan saluran untuk melaporkan pelanggaran baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Sistem pelaporan “Tell us” menyediakan saluran yang aman untuk melaporkan informasi selama 24 jam per hari melalui *on-line* ataupun telepon, dapat dirahasiakan dan dalam berbagai bahasa. Laporan ini juga dapat dilakukan melalui “The Siemens Ombudsman” yang secara profesional ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran.
4. **Program kepatuhan untuk rekan bisnis.** Secara khusus, SIEMENS menetapkan program khusus kepada rekan bisnis yang melingkupi setiap tahapan kolaborasi termasuk proses *due-dilligent* dan monitoring rekan bisnis.

Beberapa hal ini memberikan nilai lebih bagi SIEMENS dalam upaya membangun kepercayaan kepada pra *stakeholder*-nya (lihat **Gambar 3.1**).



Gambar 3.1. Program Kepatuhan SIEMENS dalam Laman Website Perusahaan

C. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal-soal latihan berikut:

No	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Menyampaikan laporan kepada publik dapat meningkatkan reputasi, transparansi dan akuntabilitas perusahaan.		
2.	Pihak rekanan bisnis perusahaan tidak memberikan resiko korupsi sehingga tidak perlu tahu program antikorupsi perusahaan.		
3.	Kegagalan program antikorupsi bukan hal yang baik untuk didiskusikan ke pihak lain.		
4.	Proses <i>due-dilligent</i> terhadap mitra kerja tidak penting dilakukan sebelum kerjasama dilakukan.		
5.	Laporan program antikorupsi tidak dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.		
SCORE (?)			

D. RANGKUMAN

1. Program pencegahan korupsi perlu diperkuat ke eksternal korporasi, dan dapat berdampak positif bagi internal perusahaan dalam memperkuat program internal, meningkatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan serta kepada masyarakat dan lingkungan bisnis.
2. Pendekatan program pencegahan korupsi secara eksternal, dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi publik dan menularkan praktik maupun program antikorupsi kepada pihak pelaku bisnis terkait.
3. Hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan pendekatan eksternal antara lain melalui laporan tahunan, laporan CSR, *website* perusahaan, presentasi di konferensi, siaran pers, dan lain sebagainya.
4. Berbagai praktik terbaik dapat dilakukan kepada pihak eksternal seperti forum-forum antikorupsi, asosiasi maupun kelompok kerja dapat menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan lain.
5. Perusahaan perlu mengatur lebih lanjut bagaimana program antikorupsinya dapat dipahami oleh pihak lain dalam interaksi bisnis.
6. Informasikan aturan baru, beri pelatihan dan diskusi dengan para pihak eksternal yang terkait, termasuk agen, distributor, anak perusahaan, pemasok

dan lain sebagainya.

7. Perlu dilakukan *due-diligent* proses sebelum membuat kerjasama dengan pihak yang terkait dengan perusahaan.

E. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, lakukanlah simulasi.

Lakukan analisis pemanfaatan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi program antikorupsi eksternal!

Media Komunikasi yang Digunakan	Informasi yang Disajikan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat Efektivitas	Tingkat Cakupan

Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut, tentukan 3 (tiga) media prioritas yang akan dipilih (Diskusi kelompok – 10 menit)!

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB IV

AKSI KOLEKTIF PROGRAM ANTIKORUPSI BAGI KORPORASI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu melaksanakan aksi kolektif, jenis-jenis aksi kolektif dan contoh pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi.

A. MODEL DAN CONTOH AKSI KOLEKTIF PROGRAM ANTIKORUPSI BAGI KORPORASI

Perusahaan mungkin telah berupaya membangun program internal maupun eksternal perusahaan untuk meredam korupsi namun tidak cukup merubah lingkungan yang korup. Walaupun dampak negatif korupsi disadari berbagai pihak, namun beberapa pihak lain memperoleh keuntungan dari korupsi.

Ditambah lagi faktor kebiasaan dan ‘budaya pemberian’ menyulitkan perusahaan untuk berani bertindak sendiri melawan perilaku koruptif. Lingkungan yang tidak mendukung ini menyebabkan perusahaan harus menghadapi resiko korupsi yang memaksa perusahaan kembali melakukan korupsi, pemerasan atau suap, khususnya di lingkungan yang kompetitif. Hal ini menyebabkan program antikorupsi yang telah dibuat belum efektif terlaksana karena lawan bisnis belum melakukan standar yang sama. Satu cara untuk mengatasi resiko itu adalah melalui kegiatan aksi kolektif (*collective action*) dengan pihak lainnya yang mungkin menghadapi tantangan yang serupa¹⁰.

Aksi kolektif adalah sebuah proses kolaborasi dan berkelanjutan antara para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk melawan korupsi. Melalui sebuah kelompok aliansi, permasalahan dapat dilihat dan diselesaikan dari berbagai perspektif sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan aksi individu yang terpisah.

¹⁰ UNODC. 2013. *An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide*. New York: United Nation.

Para pesaing dapat berkompetisi secara adil dan seajar karena berada dalam arena pertarungan yang sama. Aksi kolektif ini dapat menjadi suplemen terhadap aturan hukum atau praktik anti korupsi yang lemah¹¹.

Keuntungan aksi kolektif ini dapat dirasakan berbagai pihak. Bagi perusahaan yang mengikuti tender, hal ini akan meningkatkan kesempatan untuk menjalani pemilihan yang adil dan meningkatkan akses ke pasar, melindungi dari sanksi hukum, mengurangi biaya yang sebelumnya untuk membayar suap, meningkatkan reputasi, dan menjadikan pegawai dan pesaing bertindak sesuai etika dan bertanggungjawab.

Dari sisi pelanggan (pemerintah ataupun perusahaan), hal ini dapat meningkatkan efisiensi proses tender karena pemenang tender adalah yang terbaik, meningkatkan reputasi, menghindari waktu proses sanggah dari pihak saing tender yang kalah, dan hubungan bisnis fokus pada peningkatan kualitas dan kehandalan barang dan jasa.

Lebih luas, bagi pemerintah hal ini dapat mendorong transparansi, meningkatkan penegakan hukum, kredibilitas dan stabilitas politik, meningkatkan jumlah investasi dari investor dalam maupun luar negeri, meningkatkan citra negara dan meningkatkan efektifitas pemerintah dan proses pengadaan. Masyarakatpun dapat menikmati keuntungan dari aksi kolektif melalui meningkatnya akses ke pelayanan yang lebih baik, kualitas barang dan jasa yang meningkat, terbangunnya kepercayaan, peraturan yang diterapkan secara adil dan konsisten serta mendorong terciptanya lingkungan yang transparan dan lebih memberikan perhatian pada praktik-pratik korupsi.

Aksi kolektif dapat diinisiasi dan dilakukan melalui berbagai cara. Berdasarkan jenis dan tingkatan pelaksanaannya, aksi kolektif dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu deklarasi anti korupsi, pakta integritas, prakarsa prinsip dan sertifikasi koalisi bisnis.¹² Pembagian tipe aksi kolektif dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.

¹¹ World Bank, Op. Cit, halm. 23.

¹² Ibid, halm. 29.

		Tingkatan Penerapan	
		Komitmen Etika	Dorongan Eksternal
Jenis Aplikasi	Perjanjian Berbasis Proyek/ Transaksi	Deklarasi Antikorupsi	Pakta Integritas
	Inisiatif Jangka Panjang	Prakarsa Prinsip	Sertifikasi Koalisi Bisnis

Sumber: World Bank (2008)

Gambar 4.1. Tipe Aksi Kolektif

Implementasi aksi kolektif berdasarkan proyek atau transaksi dilakukan jika resiko korupsi ada pada transaksi/proyek yang spesifik, dan tidak memungkinkan aliansi yang besar antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk inisiatif jangka panjang dapat dilakukan jika diperlukan perubahan yang lebih signifikan, dan tidak dimungkinkannya penerapan berbasis proyek. Kesuksesan inisiatif yang berbasis proyek dapat ditingkatkan menjadi inisiatif jangka panjang dengan memperluas cakupan melalui aliansi yang lebih besar. Lebih lanjut mengenai tipe-tipe aksi kolektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deklarasi Antikorupsi

Deklarasi Antikorupsi merupakan sebuah komitmen yang dipublikasikan untuk bertindak yang benar berkaitan dengan proyek berlangsung melalui perjanjian dan tanpa pengawasan dari pihak eksternal.

Deklarasi antikorupsi bertujuan untuk:

- ✓ mencegah korupsi pada sebuah proyek dan transaksi bisnis,
- ✓ menginisiasi diskusi terbuka mengenai korupsi,
- ✓ menetapkan ekspektasi perilaku secara bersama,
- ✓ mengurangi resiko korupsi sebagai penyuap ataupun penerima karena perilaku yang tidak pantas dapat diperiksa, dan
- ✓ membuat pernyataan tertulis yang dapat dipublikasikan dan dibagi dengan para penandatangan.

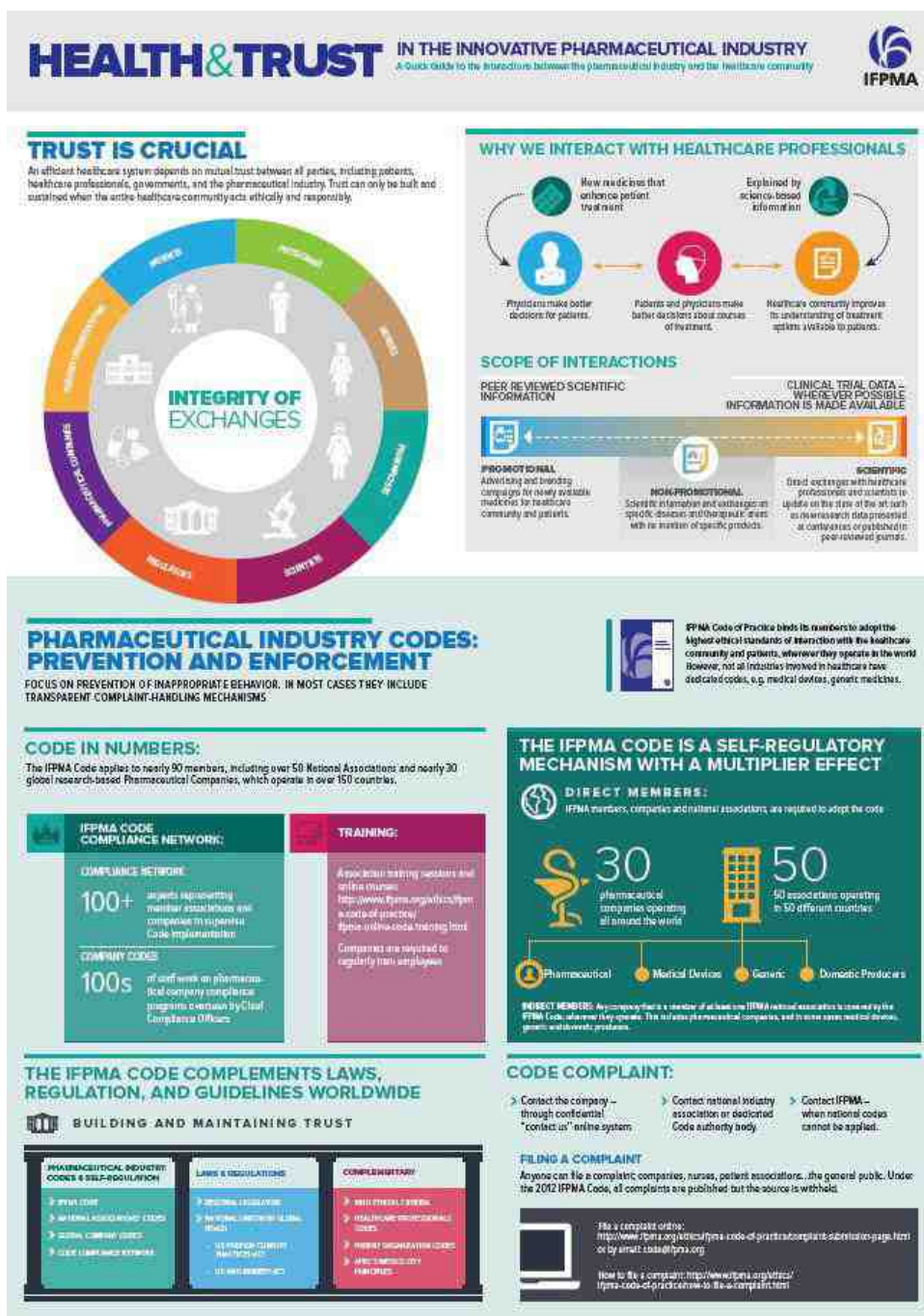
Adapun mekanisme pelaksanaannya, pihak pengguna (dalam hal ini dapat pemerintah atau perusahaan besar) berkomitmen bahwa pegawainya tidak menerima ataupun meminta suap, dan perusahaan yang ikut tender menyertakan deklarasi antikorupsi dalam dokumen tender dan berkomitmen pegawainya tidak akan menawarkan, membayarkan, menerima atau meminta suap. Deklarasi antikorupsi memuat antara lain pernyataan mengenai diberlakukannya transparansi, dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi ataupun penyuapan, serta penerapan bisnis yang adil. Pada praktik umumnya, pada deklarasi tersebut tidak memuat sanksi.

Sebagai contoh, deklarasi antikorupsi ini diterapkan pada Kode Praktik Marketing yang dibangun oleh International of Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA) untuk mendukung pelaksanaan praktik pemasaran yang beretika¹³ (lihat **Gambar 4.2**).

Versi pertama pedoman marketing ini dibuat pada tahun 1981 dan terus diperbaharui dengan revisi terakhir per September 2012. Pada revisi terakhir, pedoman ini menjangkau praktik marketing yang meliputi interaksi dengan tenaga kesehatan profesional, insitusi kesehatan dan organisasi-organisasi pasien. Elemen kunci dari Kode Praktik IFPMA ini termasuk pada pengawasan riset klinik, transparansi, biaya pelayanan, dukungan pendidikan kesehatan, interaksi dengan organisasi pasien, pelatihan dan informasi tambahan tentang bagaimana pengaduan harus ditangani dibawah Prosedur Operasi Kode Praktik IFPMA.

Seluruh anggota IFPMA harus merujuk pada Kode Praktik Marketing yang telah ditetapkan dan diadopsi oleh anggota asosiasi IFPMA di masing-masing negara. Jika terdapat pelanggaran Kode IFPMA ini, IFPMA akan mempublikasi nama perusahaan dan jenis pelanggarannya, jika perusahaan tersebut gagal untuk merespon pada jangka waktu yang ditentukan.

¹³ IFPMA, 2016, Code of Practices ,<http://www.ifpma.org/subtopics/code-of-practice-2/>, diakses 27 November 2016.



Sumber: IFPMA (2016)¹⁴

Gambar 4.2. Contoh Deklarasi Antikorupsi dalam Kode Praktik Marketing oleh International of Federation of

¹⁴ IFPMA, 2016, *Health Trust Infographic*, <<http://www.ifpma.org/resource-centre/health-trust-infographic/>>, diakses 1 Desember 2016.

2. Pakta Integritas

Pakta integritas adalah kontrak formal untuk meningkatkan transparansi proyek yang pelaksanaannya dimonitor oleh pihak eksternal. Konsep ini dikembangkan oleh Transparansi Internasional sejak tahun 1990-an.

Pakta integritas bertujuan untuk:

- ✓ sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi resiko korupsi dengan meningkatkan transparansi dari proyek ataupun transaksi bisnis.
- ✓ menciptakan arena pertandingan yang sama antara para perusahaan dengan melibatkan pihak eksternal untuk memonitoring pelaksanaannya.
- ✓ memberikan konsekuensi dari perilaku koruptif.
- ✓ menjaga para peserta dari permintaan yang tidak pantas.
- ✓ memberikan pesan anti korupsi yang dapat dilihat oleh publik.

Kontrak pakta integritas adalah perjanjian formal yang menyediakan hak dan kewajiban yang seimbang antara para pengguna dengan peserta tender yang dilakukan pada saat tahapan pra-tender. Kontrak ini memuat prinsip-prinsip transparansi, anti korupsi, anti suap dan kegiatan bisnis yang terbuka. Sanksi dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran. Demikian pula jika terdapat perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Beberapa pihak yang menandatangani pakta integritas ini adalah Pengguna (pemerintah ataupun perusahaan besar), perusahaan yang mengikuti tender, dan pihak eksternal yang memonitor. Dalam hal ini, pengguna berkomitmen bahwa pegawainya tidak akan menerima atau meminta suap dan menegakkan kebijakan tersebut, mengizinkan pelaksanaan monitor dari pihak eksternal, mengemukakan informasi terkait proyek yang relevan. Perusahaan yang mengikuti proyek tersebut akan berkomitmen untuk tidak menawarkan, membayar, menerima ataupun meminta suap ataupun berkolusi, mengizinkan pengawasan oleh pihak eksternal, mengungkapkan pengeluaran yang berhubungan dengan persiapan penawaran dan berkerjasama jika terjadi pelanggaran. Pihak eksternal akan memonitor transaksi, dokumen dan pertemuan-pertemuan serta menginformasikan kepada pelanggan jika terjadi pelanggaran.

Contoh implementasi pakta integritas dilakukan pada Proyek Kereta Sub-urban di Mexico tahun 2005. Seluruh partisipan menandatangani deklarasi integritas yang dinyatakan di bawah sumpah bahwa mereka tidak akan melakukan segala

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Pada proyek itu, pengawas independen ditunjuk oleh Transparency International Mexico untuk memonitoring pelaksanaannya. Pengawas independen hampir selalu ada pada seluruh acara yang terkait dengan proses pengadaan untuk memastikan setiap aturan dan norma dijalankan dan memastikan proses berjalan transparan dan terbuka. Pengawas independen tersebut mempublikasikan laporan hasil monitoring pada koran lokal.

3. **Prakarsa Prinsip**

Tipe aksi kolektif prakarsa prinsip tidak hanya melibatkan perusahaan, namun juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempromosikan penerapan bisnis yang transparan. Hal ini dapat merupakan inisiatif jangka panjang yang dapat diimplementasikan berdasarkan wilayah tertentu (misal negara, regional dan lain sebagainya) ataupun berdasarkan sektor tertentu.

Inti dari aksi kolektif ini adalah menyatukan prinsip antikorupsi dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat mendorong masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk menyuarakan permasalahan korupsi lebih lantang dan lebih efektif. Melalui inisiatif aksi kolektif ini juga dapat memaksa pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan antikorupsi yang lebih kuat.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah berbagi *best-practices* dan menyediakan basis data informasi, pelatihan dan advokasi maupun komunikasi eksternal lain dengan berbagai para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan aksi kolektif prakarsa prinsip dapat dilihat pada contoh sebagai berikut (lihat **Contoh 4.1**).

**Contoh 4.1. *The World Economic Forum – Partnership
Against Corruption Initiatives (PACI)*¹⁵**

PACI dibentuk tahun 2004 yang diinisiasi oleh beberapa CEO dari *World Economic Forum* dan bermitra dengan *Transparency International* dan *Basel Institute*. PACI mendorong para anggotanya untuk berkomitmen untuk “*zero tolerance*” terhadap korupsi dan penyuapan begitu juga pembangunan program antikorupsi internal sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam PACI.

Saat ini PACI telah ditandatangani oleh berbagai perusahaan (umumnya merupakan perusahaan multinational) yang secara aktif menyediakan dukungan terhadap upaya-upaya antikorupsi yang dilakukan para anggotanya. PACI telah menjadi salah satu forum terkuat lintas industri dalam upaya kolaboratif bekerjasama dengan para pemimpin bisnis, organisasi internasional dan pemerintah terkait korupsi, transparansi dan mengurangi resiko korupsi yang muncul.

4. Sertifikasi Koalisi Bisnis

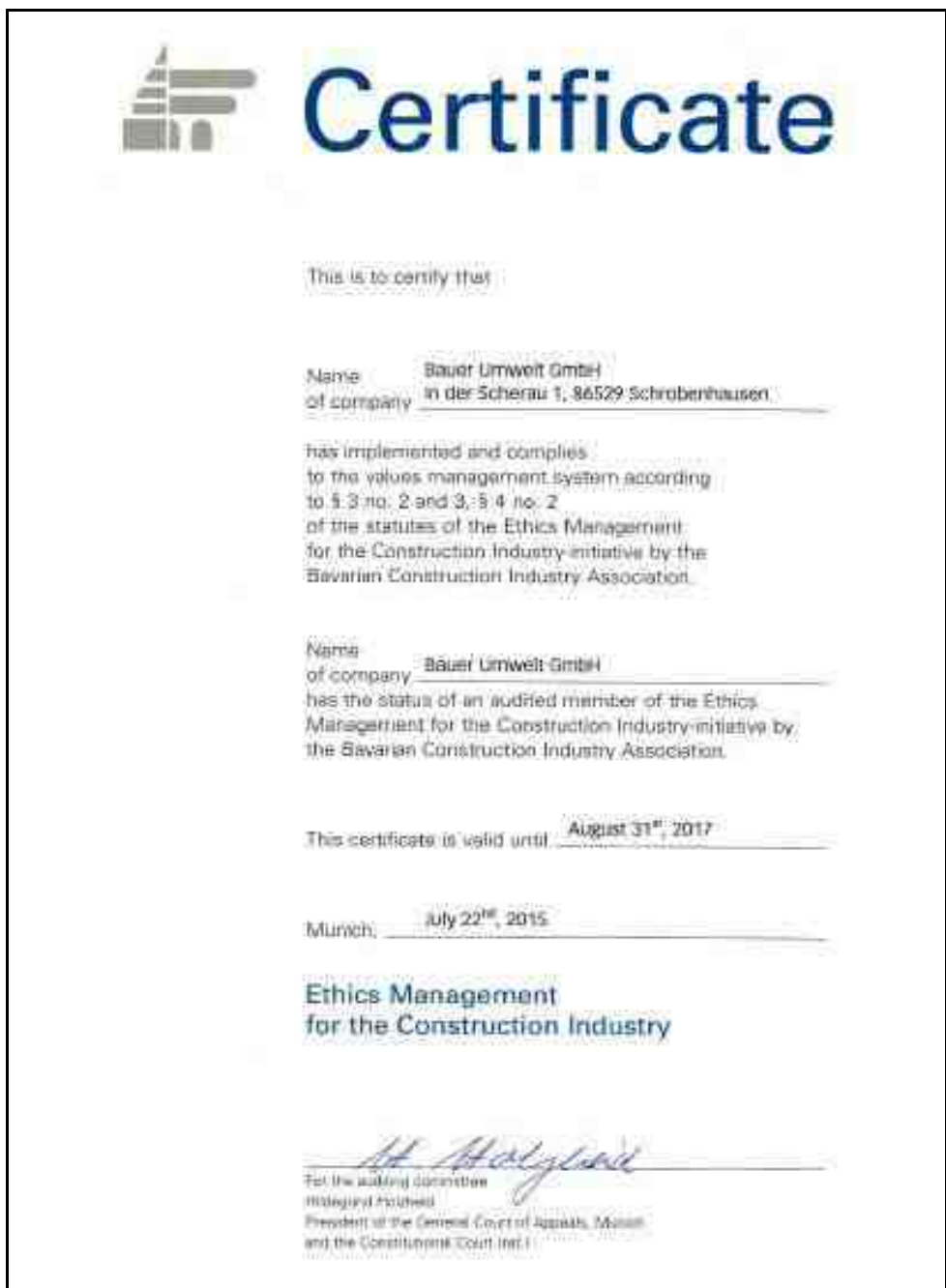
Aksi kolektif melalui pengawasan sertifikasi koalisi bisnis dan melakukan validasi kepatuhan anggota terhadap prinsip-prinsip melawan korupsi. Hal ini merupakan inisiatif dalam jangka waktu yang panjang untuk menyebarluaskan standar praktik bisnis dalam negara atau sektor tertentu. Aksi kolektif ini menguatkan mekanisme antikorupsi dan memberikan *competitive advantage* bagi perusahaan. Para anggota/*member* yang tersertifikasi menunjukkan kepada publik bahwa mereka memiliki standar dan langkah-langkah untuk melawan korupsi.

Sama halnya seperti prakarsa prinsip, aksi kolektif ini dapat dilakukan dengan memberikan advokasi ataupun komunikasi eksternal lainnya, melakukan pelatihan dan *sharing* praktik terbaik/basis data. Hal yang membedakan adalah aksi kolektif ini menekankan pada pelaksanaan verifikasi terhadap kepatuhan implementasi prinsip-prinsip yang disepakati dan hasil proses validasi tersebut menghasilkan sertifikasi.

¹⁵ World Economic Forum, 2016, *Partnering Against Corruption Initiative*,
<<https://www.weforum.org/communities/partnering-against-corruption-initiative>>, diakses 29 November 2016

Verifikasi ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal, misalnya akuntan independen, perusahaan audit, ataupun pihak ketiga yang dipercaya (misalnya akademisi, NGO ataupun asosiasi). Sertifikasi koalisi bisnis dapat meningkatkan kredibilitas daripada anggota yang terverifikasi dan meningkatkan kepercayaan atas kebijakan perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat minimal yang ditentukan dapat dikeluarkan dari inisiatif koalisi bisnis dan sertifikasi yang dikeluarkan sebelumnya tidak lagi valid.

Bagaimana hal ini diterapkan dapat dilihat pada contoh sistem manajemen etika di industri konstruksi Bayern (Bavarian). Asosiasi industri konstruksi menginisiasi aksi kolektif ini di tahun 1996 akibat beberapa skandal yang berhubungan dengan korupsi terjadi. Aksi kolektif ini bertujuan untuk memacu integritas di sektor konstruksi dan menjaga reputasi industri. Berbagai perusahaan konstruksi dari berbagai skala usaha bergabung dalam aksi kolektif ini. Para anggota harus memiliki program kepatuhan yang diaudit oleh auditor eksternal dan member yang tidak menerima ataupun kehilangan sertifikasi akan dikecualikan. Saat ini, konsep ini diterapkan hampir di seluruh Jerman dan berhasil membantu mengembalikan reputasi industri konstruksi (lihat **Gambar 4.3**).



Sumber: www.bauerenvironment.com¹⁶

Gambar 4.3. Contoh Sertifikat Koalisi Bisnis

¹⁶ Bauer Umwelt GmbH, 2016, *Certificate* <www.bauerenvironment.com/export/sites/.../BMU_Ethics_Manag.pdf>, diakses 1 Desember 2016.

B. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab latihan berikut:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Aksi kolektif tidak diperlukan karena program antikorupsi internal dan eksternal korupsi dapat efektif terlaksana di lingkungan kompetitif.		
2.	Prakarsa prinsip merupakan aksi kolektif yang tidak perlu melibatkan pemangku kepentingan lain.		
3.	Sertifikasi koalisi bisnis memerlukan monitoring dari pengawas eksternal yang independen yang dapat menjustifikasi melalui sertifikat bagaimana prinsip yang disepakati dilaksanakan oleh peserta.		
4.	Deklarasi anti korupsi wajib memuat sanksi yang dapat dikenakan bagi korporasi yang melanggar kesepakatan.		
5.	Pengawas independen yang ditunjuk untuk memonitoring pelaksanaan integritas dapat mengatur siapa yang memenangkan tender.		
SCORE (?)			

C. RANGKUMAN

- Program antikorupsi internal dan eksternal tidak cukup mencegah korupsi di lingkungan bisnis yang koruptif sehingga diperlukan aksi kolektif.
- Aksi kolektif adalah sebuah proses kolaborasi dan berkelanjutan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bertujuan untuk melawan korupsi.
- Berbagai pihak dapat merasakan keuntungan dari aksi kolektif ini, termasuk korporasi, pelanggan (pemerintah dan perusahaan) dan masyarakat.
- Berdasarkan jenis dan tingkatan pelaksanaannya, aksi kolektif dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu: deklarasi anti korupsi, pakta integritas, prakarsa prinsip dan sertifikasi koalisi bisnis.
- Aksi kolektif dapat dilakukan berbasis proyek ataupun inisiatif jangka panjang, dan dengan atau tanpa dorongan eksternal sebagai pengawas pelaksanaan dari inisiatif tersebut.

- f. Deklarasi antikorupsi dilakukan komitmen yang dipublikasikan untuk bertindak yang benar berkaitan dengan proyek berlangsung melalui perjanjian dan tanpa pengawasan dari pihak eksternal. Deklarasi antikorupsi memuat antara lain pernyataan mengenai diberlakukannya transparansi, dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi ataupun penyuapan, serta penerapan bisnis yang adil.
- g. Pakta integritas adalah kontrak formal untuk meningkatkan transparansi proyek yang dilaksanakan yang pelaksanaannya dimonitor oleh pihak eksternal. Kontrak ini memuat prinsip-prinsip transparansi, antikorupsi, antisuap dan kegiatan bisnis yang terbuka dan mengizinkan pelaksanaan monitor dari pihak eksternal.
- h. Prakarsa prinsip adalah menyatukan prinsip antikorupsi dengan berbagai *stakeholder* yang dapat mendorong masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah berbagi *best-practices* dan menyediakan basis data informasi, pelatihan dan advokasi maupun komunikasi eksternal lain dengan berbagai para pemangku kepentingan.
- i. Sertifikasi Koalisi Bisnis adalah aksi kolektif melalui pengawasan dan pemberian sertifikasi terhadap koalisi bisnis (gabungan korporasi) yang dilakukan oleh pihak eksternal dan melakukan validasi kepatuhan anggota terhadap prinsip-prinsip melawan korupsi. Jika tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan, korporasi dapat dikecualikan dari koalisi.

D. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, lakukanlah simulasi aksi kolektif untuk membangun program antikorupsi bagi korporasi.

E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Modul **Elemen-elemen Program Antikorupsi Bagi Korporasi** ini, peserta Diklat diharapkan mengerjakan soal-soal evaluasi kegiatan belajar untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran.

Soal-soal evaluasi dapat diberikan kepada peserta Diklat sebelum (*pre-test*) dan setelah (*post-test*) mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini. *Pre-test* dijadikan sebagai *baseline*, sedangkan *post-test* bertujuan untuk mengukur peningkatan kemampuan pembelajaran peserta. Jawablah soal-soal berikut:

1. Berikut adalah langkah-langkah membangun program antikorupsi, kecuali:
 - a. memiliki komitmen program antikorupsi.
 - b. memiliki monitoring kemajuan pelaksanaan program antikorupsi.
 - c. meningkatkan kerjasama dengan aparat negara dalam melancarkan kegiatan usaha.
 - d. melaksanakan rencana program antikorupsi yang telah disusun.
2. Salah satu langkah membangun komitmen antikorupsi adalah:
 - a. komitmen harus dikomunikasikan secara tertulis ke dalam bentuk formal dan diedarkan ke seluruh lapisan perusahaan.
 - b. komitmen tidak perlu memperhatikan ada atau tidaknya standar ganda dalam pelaksanaannya.
 - c. komitmen harus dilakukan secara *bottom-up*.
 - d. komitmen harus dimiliki karena menjadi *trending topic* dalam media sosial.
3. Tahapan penilaian resiko korupsi adalah sebagai berikut:
 - a. persiapan, identifikasi, penilaian, mitigasi.
 - b. mitigasi, persiapan, identifikasi, penilaian.
 - c. pembahasan, persiapan, realisasi, mitigasi.
 - d. rapat internal, rapat eksternal, rapat umum pemegang saham.

4. Apakah yang dimaksud dengan *whistle blowing system*?
 - a. sistem pemberian sanksi dan insentif yang jelas untuk mendorong pelaksanaan program antikorupsi.
 - b. sistem pengaduan pelanggaran.
 - c. penyusunan perangkat dan petunjuk pendukung (*self assesment survey*).
 - d. sistem pengenalan tindak korupsi berdasarkan kode-kode tertentu.
5. Yang bukan termasuk dampak korupsi bagi perusahaan adalah:
 - a. kehilangan reputasi dan kredibilitas.
 - b. biaya ekstra dalam menjalankan bisnis.
 - c. sanksi kepegawaian.
 - d. daftar hitam perusahaan.
6. Apakah yang dimaksud dengan FCPA (*Foreign Corruption Practice Act*)?
 - a. kebijakan pemerintah Amerika untuk melarang memberikan tawaran kepada petugas berwenang di negara lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan untuk memperoleh keuntungan.
 - b. kebijakan pemerintah Amerika untuk melarang masuknya barang-barang impor dari negara-negara dunia ketiga.
 - c. kebijakan pemerintah Amerika untuk melarang masuknya koruptor ke Amerika.
 - d. kebijakan pemerintah Amerika untuk melakukan ekstradisi koruptor dari/ke Amerika.
7. Manakah yang tidak termasuk pendekatan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan korporasi?
 - a. internal.
 - b. aksi kolektif.
 - c. eksternal.
 - d. *surveillance*.
8. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang salah dalam pelaksanaan program antikorupsi internal?
 - a. tidak ada perusahaan yang kebal atas korupsi, dan risiko akan terus tetap ada selama kegiatan korupsi diabaikan.
 - b. terdapat solusi antikorupsi yang menyeluruh.
 - c. diperlukan adanya *champion* untuk mendukung kegiatan korupsi.
 - d. diperlukan adanya *hotline* khusus.

9. Berikut adalah elemen penting program antikorupsi korporasi dari sisi internal, kecuali:
- a. menyediakan aturan internal.
 - b. menilai resiko korupsi.
 - c. melaksanakan kebijakan antikorupsi dan kepatuhan.
 - d. bersama fasilitator melakukan *roadshow* ke seluruh pemangku kepentingan.
10. Tahapan berikut diperlukan dalam pembangunan antikorupsi internal, kecuali:
- a. merencanakan program-program antikorupsi.
 - b. menilai resiko korupsi.
 - c. membuat komitmen antikorupsi secara lisan.
 - d. membuat laporan pelaksanaan program antikorupsi.
11. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dalam penyusunan program antikorupsi korporasi?
- a. perubahan regulasi diperlukan jika terdapat kelemahan aturan internal.
 - b. pengawasan dan kontrol pelaksanaan program antikorupsi diperlukan hanya jika ada pelanggaran.
 - c. program antikorupsi jangan dilakukan jika merubah sistem prosedur.
 - d. program antikorupsi hanya perlu dikomunikasikan ke pihak manajemen.
12. Program antikorupsi eksternal korporasi dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut, kecuali:
- a. berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik.
 - b. melatih para agen, distributor mengenai kebijakan perusahaan.
 - c. melaporkan kegiatan program antikorupsi internal kepada para pemangku kepentingan.
 - d. membuat kode etik internal korporasi.
13. Elemen program antikorupsi eksternal yang dapat ditunjang dengan media komunikasi yang mendukung sebagai berikut:
- a. *website* perusahaan.
 - b. laporan tahunan perusahaan.
 - c. forum diskusi.
 - d. semua benar.

14. Manakah yang tidak termasuk manfaat program antikorupsi eksternal:
- a. membangun reputasi perusahaan.
 - b. memberikan keyakinan investor.
 - c. membangun kepercayaan diri pegawai dalam melaksanakan program antikorupsi.
 - d. menjamin tidak akan terjadi pelanggaran di perusahaan.
15. Yang dimaksud dengan aksi kolektif adalah:
- a. memaksakan program antikorupsi internal kepada pesaing bisnis.
 - b. bersama-sama membentuk usaha konsultan dan audit eksternal.
 - c. sebuah proses kolaborasi dan berkelanjutan antara para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk melawan korupsi.
 - d. berkoalisi untuk mengatur persaingan usaha yang memenangkan anggota koalisi.
16. Berikut adalah tipe-tipe aksi kolektif, kecuali:
- a. Deklarasi Antikorupsi.
 - b. Pakta Integritas.
 - c. Prakarsa Prinsip.
 - d. Sertifikasi Antikoalisi Bisnis.
17. Manakah pernyataan berikut yang salah:
- a. Deklarasi Antikorupsi diaplikasi dalam jangka waktu panjang.
 - b. Pakta Integritas memerlukan pengawasan internal.
 - c. Prakarsa Prinsip merupakan aksi kolektif berbasis proyek.
 - d. Tidak diperlukan pengawas eksternal dalam pelaksanaan Deklarasi Antikorupsi.
18. Berikut adalah manfaat aksi kolektif antikorupsi, kecuali:
- a. permasalahan dapat dilihat dan diselesaikan dari berbagai perspektif.
 - b. para pesaing dapat berkompetisi secara adil dan seajar karena berada dalam arena pertarungan yang sama.
 - c. menjadi suplemen terhadap aturan hukum atau praktik antikorupsi yang lemah.
 - d. mengetahui kelemahan pesaing dalam melakukan bisnis.

19. Sertifikasi Koalisi Bisnis mengatur beberapa hal sebagai berikut, kecuali:

- pelaksanaan verifikasi terhadap kepatuhan implementasi prinsip-prinsip yang disepakati.
- sertifikasi yang dihasilkan dari proses verifikasi.
- dampak bagi perusahaan yang tidak mendapatkan sertifikasi.
- tidak memberikan advokasi kepada para anggota koalisi bisnis.

20. Prakarsa Prinsip adalah aksi kolektif yang menerapkan beberapa hal, kecuali:

- menyepakati prinsip-prinsip yang antikorupsi dalam menjalankan bisnis.
- melibatkan para pemangku kepentingan lain dalam menjalankan bisnis.
- memberikan pelatihan dan advokasi kepada para anggota.
- melakukan pengawasan eksternal atas pelaksanaan prinsip.

B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Pemahaman peserta Diklat terhadap keseluruhan konten materi modul dinilai berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan terhadap soal-soal evaluasi kegiatan belajar dalam modul. Penilaian mengacu pada kategori sebagai berikut:

Rentang Nilai Jawaban yang Benar	Kategori	Keterangan
90,1 - 100	A	Sangat Baik
80,1 - 90	B	Baik
< 80	C	Cukup

Dengan rumus penentuan nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Apabila memperoleh nilai A dan B, maka peserta Diklat dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran ke modul berikutnya. Sedangkan peserta Diklat yang mendapatkan nilai C disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

- Membaca ulang materi modul.
- Memperkaya pemahaman dengan mempelajari referensi yang tertera pada daftar pustaka dalam modul.
- Mendiskusikan dengan instruktur/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan:

- OECD, UNODC & World Bank. 2013. *Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business*.
- PRI & UN Global Compact. 2016. *Engaging on Anti Bribery and Corruption: a Guide for Investor and Companies*. Principles for Responsible Investment & United Nations Global Compact.
- UNODC. 2013. *An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide*. New York: United Nation.
- UN Global Impact & TI. 2009. *Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption*. Global Impact dan Transparency International.
- World Bank. 2008. *Fighting Corruption Through Collective Action: A Guide for Business*. Version 1.0, The World Bank.

Laman:

- Bauer Umwelt GmbH, 2016, *Certificate*
<www.bauerenvironment.com/export/sites/.../BMU_Ethics_Manag.pdf>,
diakses 1 Desember 2016.
- International Business Integrity Conference (IBIC) 2016, 16 November 2016,
<www.iibic.org>, diakses 30 November 2016.
- IFPMA, 2016, Code of Practices, <<http://www.ifpma.org/subtopics/code-of-practice-2/>>, diakses 27 Oktober 2016.
- John D. Sullivan, dkk, 2013, *"The Role of Corporate Governance in Fighting Corruption"*, CIPE, <http://www.cipe.org/publications/detail/role-corporate-governance-fighting-corruption-issue-paper>, diakses 22 Oktober 2016.
- Siemens, 2016, The Siemens Compliance System,
<http://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability/compliance.html>, diakses 30 November 2016.
- Transparency International Website, Business Integrity Toolkit,
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_integrity_toolkit,
diakses 29 November 2016.
- World Economic Forum, 2016, *Partnering Against Corruption Initiative*,
<<https://www.weforum.org/communities/partnering-against-corruption-initiative>>, diakses 29 November 2016.

DAFTAR ISTILAH

Program Antikorupsi	: Program yang dibangun untuk melawan korupsi, baik internal, eksternal, maupun aksi bersama (<i>collective action</i>).
Aksi Kolektif	: Sebuah proses kolaborasi dan berkelanjutan antara para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang bertujuan untuk melawan korupsi. Berdasarkan jenis dan tingkatan pelaksanaannya, aksi kolektif dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu: deklarasi antikorupsi, pakta integritas, prakarsa prinsip, dan sertifikasi koalisi bisnis.
Deklarasi Antikorupsi	: Komitmen yang dipublikasikan untuk bertindak yang benar berkaitan dengan proyek berlangsung melalui perjanjian dan tanpa pengawasan dari pihak eksternal. Deklarasi antikorupsi memuat antara lain pernyataan mengenai diberlakukannya transparansi, dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi ataupun penyuapan, serta penerapan bisnis yang adil.
Pakta Integritas	: Kontrak formal untuk meningkatkan transparansi proyek yang dilaksanakan yang pelaksanaannya dimonitor oleh pihak eksternal. Kontrak ini memuat prinsip-prinsip transparansi, anti korupsi, anti suap dan kegiatan bisnis yang terbuka dan mengizinkan pelaksanaan monitor dari pihak eksternal.
Prakarsa Prinsip	: Prakarsa yang menyatukan prinsip antikorupsi dengan berbagai <i>stakeholder</i> yang dapat mendorong masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah berbagi <i>best-practices</i> dan menyediakan basis data informasi, pelatihan dan advokasi maupun komunikasi eksternal lain dengan berbagai para pemangku kepentingan.
Sertifikasi Koalisi Bisnis	: Aksi kolektif melalui pengawasan dan pemberian sertifikasi terhadap koalisi bisnis (gabungan korporasi) yang dilakukan oleh pihak eksternal dan melakukan validasi kepatuhan anggota terhadap prinsip-prinsip melawan korupsi. Jika tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan, korporasi dapat dikecualikan dari koalisi.



Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Gedung Dwiwarna KPK

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920